

MASYARAKAT DAYAK DI KESULTANAN KUTAI PADA ABAD KE-19

Ita Syamtasyiah Ahyat

Abstract

The Dayak people of Kalimantan, who have occupied in the territory of Kutai Sultanate, the water kingdom along the riverbank and the upper course of the Mahakam, live by trading in the river ways. The Dayak people consist of eleven tribes; the Kenyah, Kayan, Bahau, Tunjung, Benua, and Bentian, were only some of them. They were governed under the sovereignty of the Sultanate of Kutai which had made easier for the colonial government to subdue the territory. However, the people of Kutai found ways to accept the Dayak, and vice versa. They sold forest produce, such as resin, birds' nests, rice, and wax. At the time when the Dutch annexed the area under her state, the Dayak was prohibited to do business, and the Dutch became the sole proprietor of the region, exploiting rattan besides others.

Keywords

Dayak, Kutai, Sultanate, Dutch

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Masyarakat Dayak, yang mencakup suku-suku Dayak adalah penduduk asli pulau Kalimantan yang mendiami sebagian besar pulau tersebut. Suku Dayak terdiri atas 7 suku besar yaitu: 1. Dayak Ngaju, 2. Dayak Apu Kayan; 3. Dayak Iban (Heban); 4 Dayak Klemantan; 5. Dayak Murut; 6. Dayak Punan; 7. Dayak Ot. Danum. Tujuh suku besar ini terbagi lagi menjadi 18 suku kecil, dan 18 suku kecil itu terdiri atas 405 suku kekeluargaan.¹

Suku-suku Dayak itu menyebar ke Kalimantan Barat, Timur, Tengah dan Selatan, serta Utara. Masyarakat yang mendiami daerah Kalimantan Timur adalah Suku Dayak Punan, Apu Kayan, dan Ot. Danum, yang ketiga suku besar itu terbagi dalam suku-suku yang kecil.

¹ Tjilik Riwut. *Kalimantan Memanggil*. Djakarta: Endang. 1958. 183.

Penelitian ini membatasi hanya masyarakat Dayak di Kalimantan Timur yang menjadi penduduk Kesultanan Kutai, yang berdiam di sepanjang Sungai Mahakam, antara lain kelompok **suku Kenyah, Kayan dan Bahau dan** sebelah selatan Sungai Mahakam, yaitu di dataran tinggi Tunjung, adalah **Suku Tunjung, Benua, dan Bentian**. Suku-suku Dayak itu bercampur baur dengan penduduk Kesultanan Kutai lainnya, antara lain orang Kutai, yang juga berasal dari suku Dayak.

Kelompok suku Dayak Kenyah, Kayan dan Bahau dan kelompok Dayak Suku Tunjung, Benua, dan Bentian sangat berbeda mengenai tempat asal, adat dan kebiasaan mereka. Seperti Kelompok suku Dayak Kenyah, Kayan dan Bahau, mereka sama-sama mempunyai daerah asal yang sama, yaitu Poh-Kejin atau Apo Kayan, wilayah dekat perbatasan Serawak. Dari tempat itu mereka mulai mengembara ke lain daerah, pertamanya untuk mencari tanah ladang yang lebih baik dan lebih luas, sedangkan kelompok Dayak Suku Tunjung, Benua, dan Bentian tidak mengenal tradisi tersebut.

Kelompok Suku Kenyah, Kayan dan Bahau mengatakan bahwa *Telaang Julan*, tempat kediaman orang mati, terletak di *Tokong Pulong*, di dataran tinggi *Apo Lagaan* di daerah Apo Kayan, sedangkan Suku Tunjung, Benua dan Bentian mengatakan bahwa tempat tinggal orang mati adalah di Gunung Lumut di Pegunungan Meratus. Dalam hal ini keyakinan mereka sama dengan suku-suku di Kalimantan Tengah seperti suku Maanyan dan Lawangan.

Perbedaan yang mencolok antara kedua kelompok suku tersebut, adalah adat kematian. Suku Tunjung, Benua, dan Bentian mempunyai kebiasaan untuk mengadakan pesta besar bagi orang-orang yang telah meninggal; pesta semacam itu di kalangan suku-suku di Kalimantan tengah disebut *tiwah*. Pesta itu diadakan beberapa tahun sesudah kematian. Pada penutup pesta itu, tengkorak dan tulang-tulang dikuburkan kembali, setelah dibersihkan. Pesta adat ini, yang merupakan peristiwa yang penting dalam adat suku-suku tersebut, tidak dikenal oleh suku Kenyah, Kayan, dan Bahau.

Perbedaan lain terdapat pula dalam masalah nama yang diberikan kepada dewa yang tertinggi. Suku Tunjung, Benua, dan Bentian menyebutnya *Latala*, atau *Hatala* yang digunakan oleh beberapa suku di Kalimantan Tengah. Suku Kenyah, Kayan dan Bahau tidak menggunakan istilah itu yang nampaknya berasal dari agama Islam (*Allah-ta-Ala*).

Dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang besar ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada dua kelompok suku-suku Dayak di daerah Mahakam. Di samping dua kelompok tersebut, di sekitar tahun 1900 masih ada suku-suku lain yang tidak dapat digolongkan pada dua kelompok suku tadi, yaitu suku Punan dan suku Bukat yang pada waktu itu masih mengembara. Sekarang kedua suku ini sudah mempunyai tempat tinggal yang tetap dan sebagian dari mereka sudah berbaur dengan orang Bahau dan orang Penihing. Percampuran dan pembauran antarsuku semacam itu telah terjadi di daerah perbatasan antara suku yang satu dengan suku lainnya. Perkembangan demikian dapat mengakibatkan, bahwa suatu subsuku kecil kehilangan identitasnya. Hal itu terjadi

dengan subsuku Tunjung Linggang yang bermukim di daerah paling utara di Dataran Tinggi Tunjung. Semula orang Linggang ini bukan termasuk suku Tunjung. Mereka berasal dari Hulu Riam Sungai Mahakam. Sekarang mereka disebut orang Tunjung. Mereka mempunyai sebuah mitos tentang perpindahan mereka dari daerah Hulu Riam Sungai Mahakam ke daerah Dataran Tinggi Tunjung. Pada waktu mereka pindah ke hilir, sebuah linggang atau gong besar jatuh ke dalam air Sungai Mahakam. Linggang itu tidak dapat diangkat ke luar dari air yang dalam dan deras itu. Sejak itu mereka disebut orang Linggang. Y. Mallinckrodt mengelompokkan mereka dalam kelompok suku Bahau.² Dalam bahasa mereka ada kesamaan dengan bahasa Penihing. Pada saat ini mereka sudah bercampur dengan suku Tunjung, meskipun dalam adat dan bahasa mereka, masih terdapat beberapa perbedaan. Untuk membedakan mereka dari Tunjung asli, orang Linggang disebut Tunjung Rentenung, sedangkan orang Tunjung asli diberi nama Tunjung Tengah.

SITUASI KESULTANAN KUTAI PADA ABAD KE-19

Tahun 1825 merupakan tahun yang sangat berarti bagi Kesultanan Kutai, karena penguasa Hindia Belanda mulai mengarahkan pandangannya secara langsung ke sana. Maka, pada tahun itu pula pengaruh Hindia Belanda memasuki Kesultanan tersebut melalui perjanjian-perjanjian yang diadakan antara Pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai.

Perjanjian tahun 1825, merupakan suatu perjanjian yang untuk pertama kali menempatkan Kesultanan Kutai berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Sebelumnya kedudukan Kesultanan tersebut telah diatur dalam perjanjian Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah Hindia Belanda. Perjanjian tahun itu, didasarkan pada perjanjian tahun 1823 yang menyebutkan bahwa daerah pantai timur Kalimantan menjadi milik Belanda, oleh sebab itu Belanda merasa perlu untuk mengunjungi Kalimantan Timur, agar dapat diadakan perundingan langsung dengan raja-raja di sana pada tahun 1825. Raja-raja di Kalimantan Timur tidak mengakui kekuasaan Banjarmasin, maka Banjarmasin menyerahkan kepada Belanda daerah pantai timur Kalimantan sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Untuk mengatur pemerintahan di sana dan untuk mengadakan pendekatan dengan raja-raja di Kalimantan Timur, maka Pemerintah Hindia Belanda di Batavia mengangkat George Muller sebagai *Inspecteur en Zaakgelastigde van het Gouvernement voor de Binnenlanden van Borneo*. Dengan ini maka George Muller mewakili Pemerintah Belanda dan Sultan Kutai yang bernama Sultan Muhammad Salehudin yang mewakili Kesultanan Kutai pada perjanjian yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 1825.

Perjanjian yang terdiri atas 10 pasal ditandatangani di istana Tenggarong. Pokok-

² J. Malinckrodt. *Het Adatrecht van Borneo*. Leiden: M. Dubbeldeman. 1928, 18-9.

pokok isi perjanjian adalah: bahwa raja berada di bawah perlindungan Pemerintah Hindia Belanda, bahwa semua hak sultan dalam pemungutan pajak dikuasai Belanda, baik pajak lalu lintas kapal (tol), impor dan ekspor, pajak penyewaan tanah dan penggadaian, pajak kepala bagi orang-orang Cina, maupun pajak pertambangan emas dan pertambangan lainnya; bahwa pengalihan hak pemungutan pajak itu, sultan berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 8.000,00 setiap tahun; bahwa garam dari Jawa dan Madura akan bebas tol, sedangkan terhadap garam dari tempat lain dipungut bayaran (tol) sebesar Rp. 50,00. Setiap penduduk Kutai bebas menjual garam; bahwa setiap perdagangan di daerah pedalaman dan di dataran tinggi Hulu Sungai (*bovenlanden*) tidak dipungut pajak tol. Semua penduduk Tenggarong akan diizinkan ke arah dataran tinggi Hulu Sungai. Penduduk Samarinda belum dapat berdagang ke daerah pedalaman dan dataran tinggi Hulu Sungai sampai adanya perjanjian lebih lanjut dengan sultan; bahwa uang perak dan tembaga yang berlaku di Jawa berlaku juga di Kutai; bahwa sultan berjanji untuk tidak mengadakan hubungan ataupun perjanjian dengan negara asing lainnya; bahwa jika sultan tidak menarik pungutan terhadap perahu dari Pagatan, maka Pemerintah Belanda berjanji untuk tidak mengadakan pungutan terhadap perahu di Kutai di Pagatan; akhirnya perjanjian ini akan dikirim kepada Gubernur Jendral untuk mendapat persetujuan.³

Pada tanggal 4 Mei 1826 dilanjutkan dengan perjanjian yang baru antara penguasa *Zuid-en Oostkust van Borneo* dengan Sultan Adam dari Kesultanan Banjarmasin. Fasal 4 perjanjian tersebut menyebutkan bahwa daerah-daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, antara lain pantai timur Kalimantan yaitu, Pegatan, Pulau Laut, Batu Licin, Pasir, Kutai, Berau dan bawahannya. Fasal 5 menyebutkan, bahwa daerah-daerah yang telah diserahkan tidak dapat dituntut ganti rugi oleh sultan Banjarmasin. Hal yang sama juga berlaku bagi tanah-tanah yang hasilnya telah dipungut oleh Belanda.⁴

Akibat perjanjian tanggal 8 Agustus 1825 dan perjanjian tanggal 4 Mei 1826 Kesultanan Kutai secara hukum menjadi milik Pemerintah Hindia Belanda. Sultan mengakui Pemerintah Belanda hanya sebagai "vazal" dan tidak sebagai penguasa yang menguasai segala-galanya.⁵ Maksudnya adalah bahwa sultan hanya membayar upeti,

³ KITLV, O.R. 435.301; lihat juga *Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo*, No. 126. ANRI.

⁴ *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860*. (Jakarta, 1965), hlm. 231; Bock, *op. cit.*, hlm. LIV. Bagi Kerajaan Banjarmasin perjanjian ini mulai membawa kemundurannya, yang menuju kepada perang Banjarmasin (1835-1863) antara Pangeran Tamjidillah dan Pangeran Hidayatullah pada pertengahan abad ke-19, dan membawa penghapusan Kesultanan ini oleh Residen F.N. Niewenhuyzen atas nama Pemerintah Belanda pada tahun 1860. Dan menjadi hak milik Belanda dimasukkan dalam wilayah *Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo*. *Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1634-1860* (Jakarta, 1965) hlm. 264-7; Besluit 17 Desember 1859. ANRI.

⁵ G.J. Resink. *Indonesia's History Between The Myths, Essay in Legal History and Historical Theory*. Amsterdam: W. Van Hoeve Publishers Ltd-The Hague. 1968, 133.

sedangkan hak-hak wilayah sultan, walaupun di bawah pemerintah Hindia Belanda, tetap dikuasai sultan, misalnya hak memberikan izin penangkapan teripang dan ikan lainnya di pantai timur Kalimantan di perairan wilayah sultan.⁶

Pada tanggal 11 Oktober 1844 antara pemerintah Hindia Belanda dan Kesultanan Kutai diadakan perjanjian, yang diwakili oleh A.L. Weddik, Komisariss Pengawas Kalimantan, Riau dan Lingga, dan Sultan Salehuddin. Perjanjian ini terdiri 15 fasal, isinya antara lain: Sultan harus mengakui Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa yang sah di seluruh Kesultanan Kutai, berarti sultan harus mengakui Belanda sebagai yang dipertuan; penguasaan Kutai akan dilaksanakan oleh Residen *Zuid-en Oostkust van Borneo* yang berkedudukan di Banjarmasin.⁷

Beberapa tahun kemudian (tahun 1846) pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang yang bertugas di Tenggarong sebagai *Asisten Residen Civiël Gezaghebber* (penguasa sipil) untuk *Kutai en de Oostkust van Borneo*, yang bernama H. von Dewall. Ia ditugaskan dengan Besluit tanggal 24 April 1846 No. 3, antara lain, untuk mengadakan hubungan dengan daerah-daerah di pantai timur Kalimantan untuk memberikan instruksi kepada daerah-daerah di sana sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Serta untuk memantapkan wilayah kekuasaan Belanda di sana.⁸

Akibat perjanjian 11 Oktober 1844, bagi Kesultanan Kutai terlihat perubahan di Kutai, baik terhadap sultan maupun pembesar Kesultanan. Kesultanan dimasukkan dalam wilayah kekuasaan Belanda yang berkedudukan di Banjarmasin. Dengan adanya *Civiël Gezaghebber* yang berkedudukan di Tenggarong, maka sultan dan pembesar Kesultanan harus tunduk kepada penguasa tersebut. Secara hukum dan kenyataan Kesultanan Kutai berada di bawah pengaruh pemerintah Hindia Belanda.

Dengan demikian penetrasi Belanda dalam Kesultanan Kutai berhasil menanamkan kekuasaan Belanda melalui penempatan seorang *Gezaghebber* (penguasa) sebagai wakil Pemerintah Hindia Belanda di Tenggarong. Hal ini jelas membawa perubahan baik dalam politik maupun ekonomi Kesultanan. Politik dan ekonomi Kesultanan yang sebelumnya berada di tangan sultan dan pembesar Kesultanan Kutai kini berada di tangan pemerintah Hindia Belanda.

PENDUDUK KESULTANAN KUTAI

Menurut kepercayaan penduduk setempat yang bersumber pada cerita-cerita rakyat dan Salasilah Kutai, Kesultanan Kutai Kertanegara (selanjutnya Kesultanan Kutai

⁶ Nancy Lee Peluso. "Market and Merchants: the Forest Product Trade of East Kalimantan in Historical Perspective," The Thesis of Master of Science. Cornell University. 1983, 105.

⁷ Carl Bock. *Reis in Oost-en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin* (s'Gravenhage, 1887), hlm LXIV; *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839—1848*, 172-4.

⁸ Borneo Zuid & Oost No. 126. ANRI.

saja), sebelum menjadi kerajaan yang bercorak Islam, Kesultanan Kutai tersebut bercorak Hindu, yang dikenal dengan Kerajaan Kutai, yang termasuk di bawah pengaruh Kerajaan Hindu Majapahit. Pada waktu itu di Kerajaan Kutai ditempatkan seorang wakil yang bertugas sebagai wakil pucuk pimpinan Kerajaan Majapahit. Pada waktu penguasaan Kesultanan Banjarmasin atas Kutai, di Kesultanan Kutai itu tak ada petugas-petugas dari Kesultanan Banjarmasin yang secara langsung ditempatkan di sana, sehingga dapat dikatakan bahwa Kesultanan Kutai berkembang secara sendiri tanpa dipengaruhi Kesultanan Banjarmasin.⁹

Demikianlah yang terjadi setelah pengaruh Kerajaan Majapahit atas Kesultanan Kutai berakhir, karena Kerajaan Majapahit runtuh. Sejak itu penguasaan atas daerah Kesultanan Kutai jatuh ke tangan Kesultanan Banjarmasin yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Pangeran Samudra (1595–1620).¹⁰ Selanjutnya, Kesultanan Kutai menjadi kerajaan bawahannya. Hal ini berlangsung terus sampai kekuasaan Belanda mempengaruhi Kesultanan Banjarmasin pada awal abad ke-19. Di samping itu Kesultanan Kutai sendiri tidak mengakui bahwa Kutai menjadi bawahan Kesultanan Banjarmasin.

Penduduk wilayah Kesultanan Kutai didiami oleh berbagai suku bangsa, baik suku bangsa Dayak, Kutai maupun asing. Orang Dayak adalah penduduk asli Kutai. Mereka itu antara lain berasal dari Suku Daijah, Basep, Modang-Wahhau, Modang-Long-Wai, Modang-Long-Blehh, Bongan, Benuaq, Bentian, Tunjung, Bahau-Modang, Punan. Kebanyakan dari suku-suku ini masih mempunyai kepercayaan animisme (kepercayaan pada roh nenek moyang). Orang Kutai berasal dari Suku Dayak Tunjung yang bercampur-baur dengan suku Melayu. Orang Kutai ada yang berkepercayaan animisme, tetapi ada pula yang beragama Islam. Pemeluk agama terakhir ini makin lama makin meningkat. Penduduk Kutai lainnya, orang asing, antara lain, orang Bugis, Tidung, Bajau, Banjar, Jawa, Arab dan Cina. Penduduk Kesultanan Kutai Kertanegara ini berdiam di sepanjang Sungai Mahakam dan cabang-cabang anak sungainya.

Orang Dayak penduduk Kutai mendiami daerah pedalaman Kutai, di sepanjang aliran dan anak cabang Sungai Mahakam, bahkan jauh ke pedalaman yang sukar dijangkau dengan jalan darat karena masih berhutan rimba. Di antara suku-suku Dayak, yang ada di Kutai dan paling dekat hubungan darah dengan raja Kutai adalah Dayak Tunjung. Hal ini diceritakan dalam silsilah raja-raja Kutai Kertanegara, bahwa Puncen Kerna, seorang putra raja Dayak Tunjung, menikah dengan Dewa Putri, putri dari Maharaja Sultan, yang memerintah Kutai Kertanegara pada tahun 1450 Masehi. Dayak Tunjung banyak mendiami kedua sisi sungai Mahakam di dekat daerah Melak, namun

⁹ D. Adham, *Salasilah Kutai* (Tenggarong, 1980), 9-10.

¹⁰ J.J. Ras, *Hikayat Banjar* (The Hague, 1968), hlm 430; J. Haegeman JSZ, "Bijdragen tot de Geschiedenis van Borneo," *Tijdschrift voor Indisch Taal Land-en Volkenkunde* III, 1857, jal 235, 237; Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin, 1953, hlm. 69; D. Adham *op.cit.*, 17.

jauh ke pedalaman.¹¹

Dayak Benuaq, Bentian, dan Basep juga dikenal dalam wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara. Dayak Benuaq dan Bentian termasuk suku yang sama, yakni mereka tinggal di daerah aliran Kendang Pahu dan Bongan, sedangkan Dayak Basep ada di antara keduanya tinggal di Hulu Sungai dari sungai Jembayan dan daerah aliran sungai Sangkulirang.¹²

Suku Dayak yang lain, Dayak Modang (long Blehh dan Long Wai) berasal dari Apo Kayan, yang sudah berdiam sejak satu abad yang lalu di daerah Kutai Kertanegara. Suku dari Apo Kayan menyebar di Kalimantan Tengah pada abad ke- 18, antara lain mereka menempati aliran daerah Sungai Mahakam. Mereka yang tinggal di daerah Ulu Mahakam dikenal dengan nama suku Dayak: Oevang Ping, yang terdiri dari Ping Koewot, Ping Seke, Ping Kunjung dan Ping Dehong. Suku Dayak Oevang Ping ini juga menyebar ke bagian selatan Kalimantan, yaitu ke Ulu Barito, Kapuas, dan Kahayan.¹³

Suku Dayak lainnya, yang juga berasal dari Apo Kayan, adalah Dayak Oevang Tering. Suku ini menempati wilayah Kutai Kertanegara, sesuai dengan permohonan dari Kepala Dayak Bahau, Bo Lejiu Li, yang mengaku tunduk kepada sultan di Tenggarong dengan cara memberikan putrinya, Bulan Bejiu Li, kepada Sultan Muhammad Muslihuddin yang memerintah dari tahun 1780-1810 Masehi. Permohonan dari kepala Bahau adalah agar sultan mengizinkan Raja-Tering, Obang Lawing untuk tinggal di daerah Mujub. Permohonan ini diterima oleh sultan.¹⁴

Orang Kutai tersebar di wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara, terutama di daerah-daerah tepian Sungai Mahakam, yaitu di Tenggarong, Kota Bangun, Muara Pahu, dan Melak. Selanjutnya di tepian Sungai Kedang Kepala di daerah Muara Klinjau dan tepian Sungai Belayan di daerah Kembang Janggut dan Kahala.¹⁵ Orang Kutai mulai masuk Islam pada masa pemerintahan Raja Makuta di Kesultanan Kutai Kertanegara lebih kurang 1600 Masehi.¹⁶ Mereka secara umum menggunakan bahasa Melayu yang bercampur dengan kata-kata Jawa.

Orang Bugis menempati wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara sejak tahun 1686 Masehi. Diawali dengan kunjungan persahabatan dari raja-raja Pasir dan Kutai pada tahun 1686 Masehi ke Kerajaan Boni di Sulawesi dan oleh Pangeran Aru Teko dari Kerajaan Boni, kedua raja ini dibawa menghadap penguasa Belanda, Willem Hartsink. Mereka diizinkan oleh Willem Hartsink untuk bersahabat. Sebagai buktinya kepada raja

¹¹ S.C. Knapper. "Beschrijving van de onderafdeeling Koetei," *BKI*, 58. 1905, 592.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 592-3.

¹⁴ *Ibid.*, 595.

¹⁵ *Ibid.*, 589.

¹⁶ W. Tromp Jr. "Een Reis naar Bovenlanden van Koetei. *TITLV*, XXIV. 1887. 13-4.

Pasir diberikan sebuah surat yang menjelaskan tanggal pemukiman orang Bugis di pantai timur Kalimantan. Orang Bugis yang menempati timur Kalimantan kebanyakan berasal dari Kerajaan Wajo atau Tawajo di bagian selatan Boni. Daerah di wilayah Kesultanan Kutai yang pertama kali didiami orang Bugis adalah Samarinda. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kesultanan ini sebagai pedagang.¹⁷

Orang Banjar berdiam di daerah pesisir Sungai Mahakam, dan menyebar di seluruh daerah Kutai. Mereka datang ke Kutai terutama untuk mengumpulkan hasil hutan dan hanya sebagian kecil yang berdagang. Perdagangan di daerah Kutai kebanyakan dijalankan oleh orang Bugis atas izin sultan,¹⁸ khususnya untuk mengangkut barang dari pedalaman Kutai ke pelabuhan Samarinda.¹⁹

Orang Bajau dari Kepulauan Sulu sebelumnya dikenal sebagai pelaut yang ditakuti, karena sebagian dari mereka suka merampas kapal-kapal dagang yang lewat di perairan pantai timur Kalimantan. Mereka tinggal di mulut-mulut sungai di atas kapal-kapal dengan daya muat 8 atau 10 ton. Setiap kapal terdiri dari satu keluarga, yang banyaknya kurang lebih 15 orang. Pekerjaan mereka menangkap, mengumpulkan dan mengawetkan ikan tripang.²⁰ Mereka sangat dipercaya dalam hal pembawaan dan pengiriman ikan. Pada abad ke-19 mereka tinggal di kampung-kampung di muara Sungai Mahakam di daerah pantai seperti Bontang, Bengalon, Sangkulirang, dan Manumbar.²¹

Orang Jawa, Arab dan Cina banyak berdiam di daerah Samarinda dan kebanyakan dari mereka menjadi pedagang. Pada tahun 1849, menurut A.L. Weddik, hanya ada dua rumah keluarga orang Arab dan dua rumah keluarga orang Cina serta beberapa rumah keluarga orang Jawa.²²

HUBUNGAN ORANG DAYAK DENGAN KESULTANAN KUTAI

Penetrasi kekuasaan Hindia Belanda ke dalam tubuh Kesultanan Kutai belum banyak mengalami perubahan terhadap sultan dan pembesar Kesultanan atau elite Kesultanan, akibat perjanjian yang dibuat oleh Sultan Salehuddin pada tahun 1825. Hak-hak sultan dalam bidang politik dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, misalnya sultan tidak dapat mengadakan hubungan atau perundingan dengan negara asing lainnya. Sultan digaji oleh pemerintah Belanda dengan pembayaran setiap tahun Rp.

¹⁷ Bock, *op. cit.*, hlm. iv; Knappert, *op.cit.*, 590–1.

¹⁸ Knappert, *op. cit.*, 590–1.

¹⁹ Nancy Lee Peluso. "Market and Merchants: the Forest Product Trade of East Kalimantan in Historical Perspective," (The Thesis of Master of Science, Coenel University, 1983), 28.

²⁰ George Findlay Alexander FRG. *A Directory for the navigation of the Indian Archipelago and the Coast of China* (London, 1889), 773.

²¹ Knappert, *loc. cit.*, 591.

²² A.L.Weddik. "Beknopt overzicht van het Rijk van Koetei," *Indisch Archief*, I, jaar Ie. 1849, 86.

800,00. Sebelumnya sultan bebas mengadakan hubungan dengan negara asing lainnya dan sultan tidak tergantung dengan pembayaran dari siapa pun. Selanjutnya hak sultan dalam bidang ekonomi pun berada dalam penguasaan Belanda. Misalnya, seperti yang sudah disebutkan dalam perjanjian, yaitu semua pajak yang dipungut oleh sultan harus dimasukkan ke kas negara, seperti dari pajak tol, pajak kepala orang Cina, pajak impor dan ekspor, pajak penyewaan tanah, pajak pegadaian diambil oleh Belanda. Akibat perjanjian yang dibuat pada tahun 1825 oleh Sultan Salehuddin dengan pemerintah Belanda, tampaknya Kesultanan Kutai sangat dirugikan, karena politik ekonomi Kesultanan yang dilakukan oleh sultan dan pembesar Kesultanan jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi semua ini tidak terlaksana dalam pelaksanaannya karena perjanjian ini hanya di atas kertas saja, pada prakteknya Belanda sama sekali tidak mencampuri masalah Kesultanan Kutai.²³ Secara hukum, politik dan ekonomi sultan dan pembesar Kesultanan dikuasai oleh Belanda, tetapi secara nyata elite Kesultanan masih tetap mempunyai haknya. Seperti dikatakan di atas, pemerintah Belanda belum begitu tercurahkan perhatiannya ke luar Jawa.

Sultan dan pembesar Kesultanan merupakan elite politik yang mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik maupun ekonomi, yang berkedudukan di Tenggarong. Sultan sebagai penguasa Kesultanan dibantu oleh Mangkumi, Majelis orang-orang bijaksana. Menteri-menteri, Hulubalang/Senopati, Punggawa dan Lasykar. Kemudian sebagai wakil Kesultanan yang langsung berhadapan dengan rakyat, sultan mengangkat petinggi atau kepala kampung, yang diangkat dari pemuka-pemuka kampung atau mereka yang telah berjasa terhadap Kesultanan. Sultan memberikan gelar-gelar tertentu terhadap petinggi walaupun mereka adalah orang biasa. Demikian menurut Undang-Undang Beraja Nanti/Niti, yang dipakai sebagai undang-undang Kesultanan.²⁴

Sultan Kutai yang memerintah adalah Sultan Salehuddin (1816-1845), yang memerintah Kesultanan pada usia 27 tahun. Sultan ini meninggal pada tahun 1845. Ia adalah sultan yang pertama yang mengadakan hubungan dekat dengan Belanda. Ia menikah dengan saudara sepupunya, yaitu Aji Kencana. Dengan permaisuri²⁵ Aji Kencana, Sultan mempunyai 2 orang anak: Aji Sulaiman (yang nanti akan menggantikannya) dan Aji Kipei. Selain itu sultan mempunyai beberapa orang selir, yang melahirkan beberapa orang anak yaitu: Pangeran Panji, Aji Raden, Aji Jamang, Aji Prabu, Aji Ahmed dan Aji

²³ Bock, *op. cit.*, LVII.

²⁴ J.R. Wortman. "The Sultanate of Kutai, Kalimantan Timur: A Sketch of the tradisional politic structure," *Borneo Research Bulletin*. Vol. 3, No. 2, (Desember, 1971), 54-5.

²⁵ Wanita yang dinikahi sultan dan kemudian diangkat sebagai permaisuri biasanya keturunan bangsawan. Karena nantinya putra dari permaisuri akan menggantikan kedudukan raja.

Jeliha, semuanya laki-laki kecuali yang terakhir adalah wanita.²⁶

Untuk memperbaiki hubungan sultan dengan suku Dayak Modang dan Bahau, yang pada masa pemerintahan ayahnya, maka Sultan meminta anak kepala suku tersebut untuk dijadikan istri. Kebetulan kepala suku Modang, yang bernama Lejiu Ngooi mempunyai putri bernama Bulan. Perkawinan Bulan dengan Sultan tidak melahirkan seorang anak pun. Sehingga pada waktu Sultan meninggal, Bulan kembali ke sukunya dan berdiam di Ulu Mahakam.²⁷

Sultan mempunyai banyak selir, maka keluarga sultan semakin besar jumlahnya, yang kemudian tersebar di wilayah Kesultanan Kutai. Mereka adalah putra sultan/pembesar Kesultanan yang berkuasa di wilayah Kesultanan Kutai sebagai wakil-wakil Kesultanan. Misalnya daerah Marancalung dikuasai oleh Pangeran Panji. Desa-desa Muara Kaman yang beragama Islam dikuasai oleh menteri-menteri atau keluarga sultan. Di Kota Bangun, yang dipercayai rakyat untuk memimpin adalah Aji Siti, mantan istri Sultan Muslihuddin (ayah sultan Salehuddin). Hubungannya sangat baik dengan suku Dayak pedalaman. Selanjutnya di kampung Rajuk berdiam Pangeran Anom.²⁸

Keluarga Kesultanan yang tinggal di luar Kesultanan, yaitu di Muara Kaman (banyak penduduk desa ini yang beragama Islam), mengadakan kerja paksa terhadap penduduk di sana. Misalnya penduduk desa diharuskan untuk membuka hutan untuk ditanami padi, membuat perahu, membangun rumah, dan mengadakan perdagangan yang dipaksakan.²⁹ Ada juga keluarga sultan yang hidup di daerah lain di sepanjang sungai Mahakam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka memungut pajak dari rakyat, misalnya pajak judi, pajak lalu lintas perahu di sungai Mahakam.³⁰

Daerah wilayah Kesultanan Kutai yang lain adalah daerah pedalaman, yang banyak didiami oleh berbagai suku Dayak, yang setiap suku diperintah oleh kepala suku. Suku-suku Dayak ini adalah:

Nama Suku	Daerah, Kampung atau Sungai yang didiami	Hasil yang diusahakan	Jumlah jiwa tahun 1847
Bassap	Daerah Sangkulirang	beras, getah perca, sarang burung, damar, rotan	425
Punan	Sungai Kilnjau, Sungai Mahakam, anak sungainya dan daerah yang letaknya di pedalaman.	Hasil hutan, tidak mengenal tanaman, beras.	4.150 ³¹

²⁶ P.J. Veth. "Het Koeteische Vorstenhuis," *TNI*, II. 1870, 463.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Weddik, *loc. cit.*, 94–5, 131, 135.

²⁹ *Ibid.*, 94.

³⁰ Wortman, *loc. cit.*, 52.

Dayak	Daerah Sangkulirang, Samarinda sampai Tenggarong.	beras, rotan, getah perca	320
Modang-Wahau	Sungai Telen, Sungai Wahau	beras, rotan, getah perca, sarang burung, emas	3.265
Modang-Long-Wai	Sungai Telen, Sungai Klinjau, Sungai Senyur	hasil hutan.	2.045
Modang-Long Bleh	Sungai Belaiyan dan anak sungai	hasil hutan	1.000
Bongan	Sungai Muntai dan anak sungai	hasil hutan	4.000
Benoa	Sungai Pahu dan anak sungainya, Sungai Sakka	beras, rotan, getah perca, sarang burung, lilin.	3.075
Bentien	Sungai Pahu dan anak sungainya.	Hasil hutan	1.600
Tunjung	Sungai Sakka, Benanga, Labang, Barong, Bunyut.	Hasil hutan, mandau	1.500
Percampuran Bahau & Moeang	Sungai Mahakam, anak sungainya dan daerah yang letaknya di pedalaman	beras, sarang burung, rotan, mandau (senjata orang Dayak), kulit kayu damar, lilin, tembakau, pisang, gula aren.	60.000
Punan	Sungai Kilnjau, Sungai Mahakam, anak sungainya dan daerah yang letaknya di pedalaman.	Hasil hutan, tidak mengenal tanaman, beras.	4.150 ³¹

Hasil-hasil dari daerah pedalaman ini diangkut oleh pedagang-pedagang Islam (Banjar, Bugis) dengan cara melakukan pertukaran barang, yaitu dengan garam, tembakau, candu, bahan kain, tembakau, timah, batu karang. Barang-barang pedalaman ini dibawa ke Pelabuhan Samarinda dengan perahu-perahu pedagang. Hasil-hasil ini merupakan barang-barang ekspor Kutai yang dikenakan pajak oleh Sultan 5%,³² sedangkan dari barang-barang hasil-hasil impor, sultan juga menarik pajak 5%.³³

Di samping barang-barang pedalaman yang diangkut oleh para pedagang Islam atas izin sultan, sultan juga menuntut penyerahan sarang burung, lilin, kura-kura, emas setiap tahun dari orang-orang Dayak. Selain itu sultan menuntut penyerahan beratus-ratus anak Dayak yang dijual sebagai budak, yang setiap tahun jumlahnya meningkat. Pada waktu Kesultanan Kutai berperang melawan orang Bugis,³⁴ sultan meminta 5.000 orang Dayak untuk membantu peperangannya. Demikian menurut penuturan Kepala

³¹ Extract Civiele Gezaghebber van Koetei, Januari 1846-1847, *Borneo zuid en oosterafdeeling*, No. 129, ANRI; lihat juga, Wedik, 129, 145-6, lampiran.

³² H. von Dewall, 1850. H. 36 KITLV. Lihat juga *Adatrechtbundels*, XIII: Borneo, s' Gravenhage. 1917, 315.

³³ *Ibid.*

³⁴ J. Dalton. "John Dalton en zijne berigten over Koetei en dan Majoor Muller," *TNI*, II 18. 1856, 279-80.

Suku Dayak, yang bernama Sejen kepada Dalton pada waktu ia mengunjungi Kutai selama 11 bulan (tahun 1827-1828), sejak tahun 1828 ia tidak menyerahkan anak-anak Dayak yang diminta sultan dan ia siap melawan sultan, dengan surat yang dikirim kepada sultan.³⁵

Biasanya orang-orang Dayak di wilayah Kesultanan Kutai menyerahkan hasil-hasil dari daerah mereka dibawa oleh para kepala suku ke istana Tenggarong setiap tahun pada waktu diadakan upacara adat Kutai, yaitu upacara **erau** Kutai.³⁶ Dari upacara ini sultan dapat mengetahui daerah mana yang tidak hadir dalam upacara **erau**, merupakan daerah yang tidak mengakui kekuasaan sultan. Menurut Dalton, misalnya daerah-daerah Dayak (Tanah Dayak) yang jauh di Ulu Mahakam dan berbatasan dengan Kalimantan Barat. Daerah-daerah itu hanya mengakui nama sultan saja.³⁷ Hal itu berarti bahwa daerah-daerah tersebut tidak pernah mengirim hasilnya ke Tenggarong. Mungkin jaraknya terlalu jauh, dan aliran sungai Mahakam di Ulu Mahakam agak deras, sehingga sukar dilayari dengan perahu yang biasa dimiliki oleh orang-orang Dayak.

Seperti yang dikatakan di atas, untuk memperbesar ekonominya dan untuk memperluas pengaruhnya dengan penduduk pedalaman, maka sultan menjalin hubungan dengan kepala suku melalui perkawinan dengan putra-putri mereka. Begitulah terjadi persahabatan di antara mereka dan dapat memperkuat kedudukan sultan.

Sementara suku-suku yang merdeka di Mahakam Hulu terjepit di antara kekuasaan Kesultanan Kutai dan kekuasaan suku Iban dari Serawak. Sultan Kutai sedang berusaha agar mereka mengakui kekuasaannya dan memaksa mereka berdagang dengan pihaknya. Suku Iban pun menginginkan wilayah Mahakam Hulu, yang terdapat desa suku Aoheng dan kampung besar suku Koeng-Irang, suku Iban melakukan serangan masal terhadap wilayah tersebut tahun 1885, yang menghancurkan semua desa suku Aoheng dan kampung besar suku Koeng Irang. Setelah serangan tersebut bagi suku-suku di Hulu Mahakam merupakan ancaman yang selalu terbayang. Koeng kepala suku yang paling berpengaruh di Mahakam Hulu, berjuang keras agar daerahnya tetap bebas dari Kesultanan Kutai, yang telah menyebabkan suku-suku di wilayah hilir Mahakam banyak menderita karena campur tangan Kesultanan Kutai. Belare, salah satu kepala desa suku Aoheng, sedang bersaing untuk menempati kedudukan terkemuka di desanya,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Upacara Erau adalah upacara adat Kutai yang dirayakan di istana raja tergantung dengan tujuan upacara. Upacara ini kadang-kadang diadakan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun atau pun 10 tahun. Sedangkan Erau Kutai ini setiap tahun sekali diadakan di istana Tenggarong lamanya satu minggu. Adat ini diadakan agar diperoleh kesuburan dan kemakmuran di semua tanah Kesultanan baik darat maupun laut, sehingga hasilnya diharapkan berlipat ganda. Sampai abad ke-20 ini upacara Erau masih dirayakan tetapi 3 tahun sekali. David Boyce, *Kutai East Kalimantan: A Journal of Past and Present Glory*, (Kota Bangun, 1986), hlm. C. 19; dan wawancara penulis dengan keluarga Kesultanan Kutai dan penduduk Tenggarong pada bulan Juli 1990.

³⁷ Dalton, *loc. Cit*, 277.

telah memihak kepada Sultan Kutai, yang ingin mematahkan perlawanan suku Koeng Irang; sementara Paron, seorang kepala desa suku Aoheng lainnya, telah bersumpah setia kepada Sultan Banjarmasin.³⁸

Mungkin sekali, Belare, karena sikapnya memihak Kutai, ia sempat mendalangi keresahan yang mencegah ekspedisi pertama memasuki wilayah Mahakam pada tahun 1894, dan berhasil, akan tetapi kemudian yang memungkinkan ekspedisi kedua sukses adalah Koeng Irang, ia segera menyadari bahwa Belanda kuat dan dapat digunakan membantu dalam persaingan politik lokal. Ia meminta Kepada Nieuwenhuis (wakil Pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Borneo) mengajukan petisi “atas nama semua suku di Mahakam” kepada pemerintah Belanda agar langsung mengambil alih kekuasaan atas daerah Hulu Mahakam. Tentu saja hal itu sangat menggembirakan Nieuwenhuis.³⁹



Sumber: Google Image

KESIMPULAN

Masyarakat Dayak yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai, berdiam di cabang-cabang sungai Mahakam, dan hulu sungai Mahakam, mereka melakukan perdagangan antarsungai. Hal ini sangat membantu Kesultanan Kutai, yang merupakan kerajaan sungai, yang perekonomiannya tergantung pada wilayah hulu sungai. Perdagangan di sini antara lain hasil hutan, damar, sarang burung, beras dan lilin.

Antara Sultan Kutai terjadi pernikahan dengan putri Dayak suku Dayak Modang dan Bahau, Kebetulan kepala suku Modang, yang bernama Lejiu Ngooi mempunyai putri bernama Bulan. Perkawinan Bulan dengan Sultan tidak melahirkan seorang anak pun, sehingga pada waktu Sultan meninggal, Bulan kembali ke sukunya dan berdiam di Ulu

³⁸ Dr. Anton W. Nieuwenhuis, *Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994, xvii.

³⁹ *Ibid.*

Mahakam.⁴⁰ Dengan demikian orang Dayak di wilayah Kesultanan sangat mendukung politik dan perdagangan Kesultanan Kutai.

Dengan datangnya Belanda ke Kalimantan Timur sebagai penguasa, khususnya ke Kesultanan Kutai, kemudian mencampuri pemerintahan Kesultanan Kutai. Maka kekuasaan Sultan dibatasi, dan orang Dayak dilarang berdagang di pelabuhan Samarinda, yang merupakan pelabuhan Kesultanan Kutai dan pintu gerbang Kesultanan. Selanjutnya hasil perdagangan orang Dayak menjadi monopoli perdagangan Belanda.

DAFTAR ACUAN

- Adham, D. *Salasilah Kutai*. Tenggarong: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten, Kutai, Kalimantan Timur. 1980.
- Anton W. Nieuwenhuis, Dr. *Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Besluit 17 Desember 1859, ANRI.
- Bock, Carl. *Reis in Oost-en Zuid-Borneo van Koetei naar Banjermassin*. Martinus Nijhoff s'Gravenhage. 1887.
- Borneo Zuid & Oost No. 126, ANRI.
- Boyce, David. *Kutai East Kalimantan: A Journal of Past and Present Glory*. Kota Bangun: 1986.
- Dalton, J. "John Dalton en zijne berigten over Koetei en dan Majoor Muller," *TNI*, II 18. 1856.
- Extract Civiele Gezaghebber van Koetei, Januari 1846-1847, *Borneo zuid en oosterafdeeling*, No. 129, ANRI.
- George Findlay Alexander FRG. *A Directory for the navigation of the Indian Archipelago and the Coast of China*. London. 1889.
- H. von Dewall, 1850. H. 36 KITLV. Lihat juga *Adatrechtbundels*, XIII: Borneo, s'Gravenhage, 1917.
- Hageman JSZ, J. "Bijdragen tot de Geschiedenis van Borneo," *Tijdschrijft voor Indisch Taal Land-en Volkenkunde* III. 1857.
- Hasan Kiai Bondan, Amir. *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Bandjarmasin: Fadjar. 1953.
- Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848*. Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1973.
- KITLV, O.R. 435.301.
- Knapper, S.C. "Beschrijving van de onderafdeeling Koetei," *BKI*, 58. 1905.
- Malinckrodt, J. *Het Adatrecht van Borneo*. Leiden: M. Dubbeldeman. 1928.

⁴⁰ *Ibid.*

Nancy Lee Peluso. "Market and Merchants: the Forest Product Trade of East Kalimantan in Historical Perspective," The Thesis of Master of Science, Cornell University. 1983.

Ras, J.J. *Hikayat Banjar*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1968.

Riwut, Tjilik. *Kalimantan Memanggil*. Djakarta: Endang. 1958

Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860. Jakarta: Arsip Nasional. 1965.

Tromp Jr, W. "Een Reis naar Bovenlanden van Koetei, *TITLV*, XXIV. 1887.

Veth, P.J. "Het Koeteische Vorstenhuis," *TNI*, II. 1870.

Wortman, J.R. "The Sultanate of Kutai, Kalimantan Timur: A Sketch of the tradisional politic structure," *Borneo Research Bulletin*, Vol. 3, No. 2, Desember. 1971.

Zuid-en Oosterafdeeling van Borneo, No. 126, ANRI.